



Koneksi Politik dan Manajemen Skandal: Sebuah Temuan Empiris Perusahaan BUMN

Ronauli V Marbun, Andi Manggala Putra*, Aniek Wijayanti

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jalan RS. Fatmawati No. 1 – Pondok Labu Jakarta Selatan 12450

ronaulivmarbun@upnvj.ac.id; andimanggalaputra@upnvj.ac.id*; aniekwijaya@upnvj.ac.id

*corresponding author

doi.org/10.33795/jraam.v5i2.002

Informasi Artikel

Tanggal masuk	14-09-2020
Tanggal revisi	26-10-2020
Tanggal diterima	03-02-2021

Keywords:

Political Connection;
Restatement;
Scandal Management.

Abstract

This study aims to examine the probability of scandal management for state owned enterprises that are politically connected companies, and further compares the same phenomena with private companies. Scandal management in this study uses two measurements, financial report restatement and disclosure of companies' scandals in the media. The Method used is the Quantitative Response Model (QRM). The test result show that restatement has no effect on scandal management while the news of companies scandal has a significant effect on scandal management. The results indicate that state-owned-companies whice are politically connected have a greater probability of scandal management than private companies.

Kata kunci:

Koneksi Politik;
Restatement;
Manajemen Skandal.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji probabilitas terjadinya manajemen skandal pada perusahaan milik negara yang terkoneksi politik dan membandingkannya dengan fenomena serupa pada perusahaan swasta. Manajemen skandal dalam penelitian adalah faktor dependen yang diperkirakan dipengaruhi oleh penyajian ulang laporan keuangan dan pemberitaan skandal perusahaan pada media publik. Metode yang digunakan adalah *Quantitative Response Model* (QRM). Hasil pengujian menunjukkan bahwa *restatement* tidak berpengaruh terhadap manajemen skandal sedangkan pemberitaan skandal berpengaruh signifikan terhadap manajemen skandal. Hasil ini menunjukkan bahwa BUMN yang merupakan perusahaan terkoneksi secara politik memiliki probabilitas lebih besar terhadap manajemen skandal dibandingkan perusahaan swasta.



1. Pendahuluan

Kecurangan adalah kata dipakai secara umum dan meliputi berbagai arti terkait

kecerdasan manusia untuk melakukan tipu daya ataupun kelicikan yang dirancang untuk mendapatkan manfaat dari pihak tertentu

dengan cara yang tidak tepat [1]. Kecurangan pelaporan keuangan merupakan fenomena yang biasa terjadi di beberapa perusahaan-perusahaan Indonesia maupun dunia. Temuan dari *Association of Certified Fraud Examiners* menunjukkan gambaran yang terjadi pada umumnya yaitu terdapat 5% dari pendapatan kotor institusi merupakan target kecurangan yang terjadi setiap tahunnya[2]

Indikasi kecurangan yang salah satunya berasal dari tindak manipulasi manipulasi terhadap angka-angka dalam laporan keuangan dapat juga dilihat dengan menggunakan indikator manajemen laba, perpajakan dan adanya penyajian ulang laporan keuangan [3][4][5]. Penyajian ulang laporan keuangan mengindikasikan bahwa terdapat tujuan-tujuan manipulasi terhadap laporan keuangan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas laba yang bisa mengakibatkan pihak yang berkepentingan keliru dalam pengambilan keputusan ekonomi[5]. Kecurangan laporan keuangan dapat diindikasikan dari data publik di media yang terilis tentang daftar perusahaan yang melakukan penipuan [6]. Kecurangan perusahaan-perusahaan yang telah dipublikasikan ini mengakibatkan mereka mengalami skandal, yang akan mendorong penyajian ulang terhadap keuangannya.

Penelitian ini menyoal manajemen skandal dengan menambah pengukuran terhadap manajemen skandal tersebut. Pengukuran tambahan yang dilakukan adalah dengan memperhatikan publikasi skandal perusahaan yang terdapat pada media[7].

Saat suatu skandal terjadi pada suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah harus terlebih dahulu memberikan ijin bagi BUMN tersebut untuk dapat melakukan kegiatan di pasar. Pemerintah memiliki kepentingan sebagai pelaksana yaitu meningkatkan pendapatan Negara dan berperan sebagai pemilik perusahaan yang membuat BUMN terhindar dari skandal [8]. Pada satu sisi pemerintah berkepentingan sebagai pelaksana, namun di sisi lain pemerintah juga berkepentingan sebagai pemilik perusahaan yang menginginkan peningkatan kualitas

manajemen untuk pengembalian investasi yang optimal. Hal ini mengakibatkan munculnya perbedaan kepentingan antara banyaknya sumber daya yang dibutuhkan serta tidak kompetennya sumber daya yang dimiliki.

Fenomena ini dapat dilihat dengan banyaknya pimpinan BUMN yang ditunjuk berdasarkan kedekatan politik. Kedekatan ini juga dapat menyebabkan pimpinan BUMN tidak dapat tampil mandiri mengelola perusahaan karena adanya celah yang terdapat dalam hubungan tersebut[9][15][22]. Berbeda dengan BUMN, perusahaan swasta cenderung memiliki mekanisme yang lebih selektif dalam pemilihan sumber daya melalui tidak adanya kelompok koalisi politik. Hal ini merupakan bentuk pencegahan skandal yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan[12].

Skandal pada perusahaan milik negara (BUMN) disebabkan oleh intervensi dari pihak luar perusahaan, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ataupun dari birokrasi sendiri. Contoh skandal kecurangan tersebut dapat dilihat pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada Januari 2020 yang dinyatakan melakukan rekayasa akuntansi (*window dressing*) dengan laba semu (www.cnnindonesia.com). Kasus lain adalah pada PT Garuda Indonesia yang menyajikan laporan keuangan 2018 tidak selaras dengan Standar peraturan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ataupun PSAK (www.economy.okezone.com). Skandal-skandal ini muncul karena adanya sifat oportunistik dari masyarakat/pelaku usaha Indonesia dalam bentuk manajemen laba dengan memanfaatkan keadaan negara dengan *agency cost* yang rendah dan memanfaatkan masa transisi penggunaan IFRS (*Internasional Financial Reporting Standards*) pada tahun 2011 untuk melakukan manajemen laba [13][14]. Hal lain yaitu berupa kepemilikan hubungan secara politik untuk melakukan hal-hal yang memungkinkan terjadinya skandal[3].

Fenomena tersebut juga dapat terjadi akibat dari indikasi pekatnya kolusi atau

permasalahan pada saat pengangkatan Komisaris maupun Direksi di BUMN[15] yang dilakukan berdasarkan keputusan Menteri BUMN melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 3 Tahun 2015. Hal ini berlanjut pada banyaknya kepentingan-kepentingan tersembunyi yang kemudian saling bertentangan. Seharusnya manajer-manajer tidak bertindak atas dasar misi masing-masing melainkan atas target utama mereka yaitu berupa keperluan institusi. Manajer-manajer BUMN tidak akan meninggalkan institusinya karena mereka berupaya menggapai tujuan utama organisasi mereka[17], akan tetapi ada indikasi bahwa keterlibatan orang-orang politik di dalam perusahaan tidak membantu perusahaan untuk meraih tujuannya tetapi justru menimbulkan masalah baru di dalam perusahaan dengan menyelesaikan kepentingan organisasinya dengan kekuasaan politik yang dimiliki [18][19]. Penelitian yang dilakukan di Cina menemukan bahwa penegakan hukum di Cina lemah dan hukuman yang dijatuhkan untuk penipuan laporan keuangan cenderung terlalu rendah untuk meningkatkan insentif bagi orang dalam untuk memberikan pelaporan keuangan berkualitas tinggi[6]. Oleh karena itu, perusahaan yang terhubung secara politik lebih mungkin terlibat dalam keuangan melaporkan penipuan.

Pengusaha dalam keterkaitannya dengan politik juga seringkali dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk mengurangi kritik terhadap pemerintah dan menyetujui segala kebijakan yang dikeluarkan[18]. Meskipun demikian, harus diakui pula bahwa saat ini sudah banyak BUMN yang menunjukkan manajemen yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2019, saat PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. mendapat peringkat sepuluh dalam penghargaan Majalah Forbes untuk lima puluh perusahaan terbaik di Indonesia (www.news.detik.com). Walaupun demikian, secara umum masih banyak BUMN yang perlu dibenahi seperti PT

Garuda Indonesia Tbk yang mengalami skandal tentang pengakuan laba bersihnya tahun 2018 dan PT Asuransi Jiwasraya menyajikan pencatatan yang berlebih terhadap pos piutang usaha perusahaan dan pos persediaan. Pada perusahaan swasta skandal terjadi di PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk melalui hubungan politik yaitu melalui kerjasamanya dengan PT Pertani (Persero). Melalui departemen beras, PT Tiga Pilar Sejahtera Food melakukan hubungan kerjasama dengan PT Pertani dan melakukan kecurangan dalam laporan keuangannya dalam bentuk kelebihan penyajian pada beberapa akun keuangan (CNBC Indonesia, 2019). Perbaikan terhadap manajemen dilakukan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik untuk meminimalisir terjadinya skandal.

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa *political connection* memiliki hubungan dua arah yaitu meningkatkan kecurangan keuangan dan melemahkan kecurangan keuangan yang berarti berdampak positif terhadap perusahaan. Menurut penelitian terdahulu, tindakan curang dalam pelaporan keuangan pada entitas yang memiliki koneksi politik mengalami keterbatasan kemampuan pihak manajer untuk melakukan kecurangan[6]. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian lain yang mengungkapkan politik di perusahaan tidak berdampak pada kecurangan laporan keuangan yang diukur melalui agresivitas pajak perusahaan yang berarti koneksi politik tidak memperburuk pelaporan keuangan[4]. Seorang professor dari *Faculty of Business & Law Deakin University* mengungkapkan bahwa entitas yang memiliki komisaris ataupun direktur yang terhubung politik memiliki potensi yang besar untuk terjadinya tindak keberpihakan dan korupsi yang telah banyak diberitakan[21]. Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan politik berpengaruh terhadap praktik kecurangan pada laporan keuangan[22][11]. Dalam penelitian lain

disebutkan bahwa koneksi secara politis yang dimiliki suatu perusahaan menunjukkan kinerja keuangan yang semakin tidak baik dibandingkan dengan yang tidak terkoneksi politik[11]. Salah satu penyebab sehingga berdampak pada manajemen terhadap laba suatu entitas ialah adanya koneksi terhadap politik pada entitas tersebut baik dalam aktivitas akrual maupun riil[3]. Peneliti berargumen bahwa koneksi politik dapat meningkatkan terjadinya manajemen skandal.

Penelitian ini bertujuan menginvestigasi probabilitas terjadinya manajemen skandal terhadap perusahaan yang terkoneksi politik, baik pada perusahaan milik negara (BUMN) maupun swasta di Indonesia. Manajemen skandal ini merupakan langkah awal sebelum dilakukannya pendeteksian dini, pencegahan dan penyelesaian terhadap skandal tersebut .

2. Metode

Populasi penelitian ini menggunakan institusi BUMN dan perusahaan swasta yang mewakili sembilan sektor dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia kurun waktu 2017-2018. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ialah data sekunder yaitu data laporan keuangan tahunan perusahaan. Perolehan data tersebut ialah melalui dari laman resmi Bursa Efek Indonesia yang diakses dari situs www.idx.co.id serta melalui laman resmi tiap entitas terkait. Dengan metode pengumpulan data berupa dokumentasi.

Jumlah sampel pada penelitian ini sebesar 100 perusahaan-tahun (50 perusahaan x 2 tahun). Adapun kriteria perusahaannya yaitu perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 dan 2018, perusahaan-perusahaan BUMN dan swasta yang mewakili setiap sektor, perusahaan yang memiliki penyajian kembali laporan keuangan tahunannya serta yang tidak menyajikan kembali laporan tersebut, perusahaan yang diidentifikasi melakukan skandal perusahaan pada tahun tersebut, dan perusahaan yang menampilkan data secara keseluruhan terkait pengukuran setiap

variabel pada laporan keuangan secara lengkap pada tahun 2017-2018.

Variabel dependen pada penelitian ini adalah manajemen skandal. Skandal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu perbuatan yang memalukan dan menurunkan martabat seseorang dan menyebabkan turunlah rasa percaya pihak investor dan *stakeholder* terhadap organisasi tersebut [23]. Oleh karena itu, kecurangan yang terjadi dalam pelaporan keuangan merupakan skandal yang terjadi pada manajemen karena mengakibatkan penyajian laporan keuangan tidak selaras dengan standar akuntansi yang berlaku dan muncul ke permukaan publik merupakan manajemen skandal. Pemahaman mengenai skandal tersebut didukung oleh sebuah penelitian yang mengungkapkan perihal skandal laporan keuangan adalah berupa tindak manipulasi terhadap laporan keuangan yang dilakukan pihak manajemen berupa pemalsuan informasi dalam laporan keuangan yang membuat performa perusahaan seolah-olah meningkat untuk menutupi situasi organisasi yang sebenarnya[24].

Manajemen skandal dalam kajian ini yang diukur dengan kecurangan laporan keuangan dengan menggunakan dua pengukuran, yaitu: melihat ada atau tidaknya penyajian ulang laporan keuangan dan skandal perusahaan yang muncul pada media yang berhubungan dengan politik. Indikasi kecurangan laporan keuangan dapat timbul dari adanya penyajian ulang (*restatement*) laporan keuangan suatu perusahaan yang kemudian penyajian ulang tersebut merupakan skandal yang ada pada manajemen[5]. Pengukuran *restatement* dilakukan dengan melihat keterangan pada laporan keuangan perusahaan dan atau penyajian laporan revisi akibat perubahan terhadap isi laporan keuangan pada laman resmi BEI.

Pengukuran skandal pada media dalam penelitian ini berbeda dengan yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan laman perusahaan untuk mengungkapkan informasi perusahaan[7]. Pada suatu penelitian dilakukan pengukuran

menggunakan daftar perusahaan curang di media yang diterbitkan atau di laman mereka secara berkala yang diperoleh dari China Securities Regulatory Commission (CSRC) dan /atau dua bursa saham nasional (Shanghai dan Bursa Efek Shenzhen)[6]. Berbeda dengan penelitian ini, sumber data skandal kecurangan dan masalah-masalah perusahaan yang berasal dari media daring. Dengan kriteria tersebut menunjukkan bahwa adanya skandal yang tersebar di media mengindikasikan bahwa terdapatnya kecurangan. Kedua pengukuran ini dilakukan dengan variabel *dummy* yaitu pemberian nilai satu (1) dan nol (0).

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Koneksi Politik (*Political Connection*). Koneksi Politik ialah keadaan dimana adanya keterkaitan antar dua belah pihak dimana salah satu pihaknya memiliki kepentingan politik. Hubungan tersebut dijalin demi mendapatkan suatu keuntungan antara kedua belah pihak tersebut[25]. Hubungan politik yang ada dalam BUMN merupakan alat yang mendukung kinerja perusahaan karena perusahaan tersebut merupakan bagian dari administrasi publik maka perusahaan tersebut patuh pada skema tata kelola dan kepemimpinannya, mereka dapat memperoleh manfaat atau dipengaruhi oleh kinerja birokrasinya[10]. Dalam penelitian ini pengukuran koneksi politik dilakukan dengan melihat status kepemilikan perusahaan, apabila perusahaan tersebut merupakan BUMN dan atau BUMD serta terdaftar di BEI maka dikatakan terkoneksi politik[26].

Penelitian ini mengukur variabel independen *Political Connection* (koneksi politik) dengan *variabel dummy*. Variabel yang dimaksud adalah dengan memberikan angka satu (1) pada BUMN dan BUMD dan angka nol (0) pada yang tidak. Pengklasifikasian suatu institusi dalam kategori terkoneksi politik atau tidak adalah jika perusahaan terdaftar di BEI dan merupakan BUMN atau BUMD[26].

Penelitian ini juga menggunakan variabel control yaitu, pertama, *return-on-Asset* (ROA) yang dihitung dengan membandingkan *net income* dengan jumlah aset secara keseluruhan pada akhir periode. ROA merupakan suatu parameter yang menggambarkan kualitas dari keuangan suatu entitas[27]. Kedua, *Book-to-market* yang di hitung melalui pengurangan liabilitas dan *minority shareholder* terhadap total aset perusahaan dengan total *market capitalization* yang diukur dengan jumlah saham beredar di kalikan dengan harga saham per 31 Desember tahun tersebut [29]. Ketiga, *Firm size*, yang diukur dengan menggunakan hasil dari *logaritma natural* (*ln*) jumlah aset perusahaan secara keseluruhan. Dengan anggapan bahwa jumlah aset perusahaan secara keseluruhan tersebut relatif lebih stabil daripada total dari penjualan dan nilai dari kapitalisasi pasar[28]. Keempat, sektor dan tahun, yang merupakan pengukuran terhadap perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel untuk mengetahui sektor mana yang memiliki nilai skandal tertinggi. Jika perusahaan tersebut berada pada satu sektor dan atau pada satu tahun maka diberikan nilai satu (1) jika tidak maka diberikan nilai nol (0). Kontrol tahun pada penelitian ini adalah 2017 dan 2018.

Penelitian ini menggunakan software Microsoft Excel 2016 dan STATA 16 dengan metode *Quantitative Response Model*. *Quantitative Response Model* (QRM) dipilih karena variabel dependen yang peneliti gunakan adalah variabel kualitatif. Analisa dari QRM ini memungkinkan pencarian probabilitas terjadinya suatu keadaan berdasarkan variabel independen yang memengaruhinya. Pada penelitian ini dilakukan analisis statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji multikolinearitas. Selanjutnya dilakukan uji model Regresi, uji Likelihood Ratio, uji koefisien determinasi, dan uji regresi berganda.

Model 1:

$$REST_{it} = \alpha + \beta_1 POLICON_{it} + \beta_3 BTM_{it} + \beta_4 ROA_{it} + \theta_{1-8} Sector_{it} + \theta_9 YearControls_{it} + \varepsilon$$

Model 2:

$$SKANDAL_{it} = \alpha + \beta_1 POLICON_{it} + \beta_2 FMSIZE_{it} + \beta_3 BTM_{it} + \beta_4 ROA_{it} + \theta_{1-8} Sector_{it} + \theta_9 YearControls_{it} + \varepsilon$$

3. Hasil dan Pembahasan

Populasi yang digunakan pada penelitian ini meliputi institusi BUMN dan swasta yang terdaftar pada BEI di tahun 2017-2018 dengan jumlah sampel pada penelitian ini sebesar 100 perusahaan-tahun (50 perusahaan x 2 tahun). Sampel yang memenuhi kriteria-kriteria dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan statistik deskriptif, perusahaan yang tidak melakukan *restatement* salah satunya adalah perusahaan First Media Tbk (KBLV) pada tahun 2018 dan perusahaan yang melakukan *restatement* laporan keuangan salah satunya adalah perusahaan Bukit Asam Tbk (PTBA) pada tahun 2017.

Untuk pengukuran dengan skandal yang terdapat pada media, PT. Adhi Karya Tbk. (ADHI) pada tahun 2017 merupakan salah satu perusahaan yang diidentifikasi melakukan skandal, yaitu berupa dugaan korupsi penjualan tanah milik negara di Kalimantan Raya, Tambun, Bekasi oleh PT Adhi Karya (Persero) kepada pengusaha Hiu Kok Ming, sedangkan perusahaan yang teridentifikasi tidak melakukan skandal dalam perusahaannya salah satunya terjadi pada tahun 2018 oleh PT. Aneka Gas Industri Tbk. (AGII).

Variabel independen pada penelitian ini adalah koneksi politik yang diukur dengan kepemilikan perusahaan oleh pemerintah yaitu perusahaan dalam bentuk BUMN. Tabel hasil uji statistik menunjukkan bahwa 20 perusahaan sampel memiliki hubungan politik melalui kepemilikan pemerintah (BUMN) dan 30 perusahaan sampel tidak memiliki hubungan politik melalui kepemilikan pemerintah (swasta). Tingkat

koneksi politik di entitas yang menjadi sampel penelitian memiliki rata-rata sebesar 0,40 dan *standard deviation* sebesar 0,4924. Artinya terdapat 40% perusahaan yang memiliki koneksi politik.

Dalam penelitian ini juga dilakukan pengujian normalitas terhadap variable adalah menggunakan uji *Skewness-Kurtosis*. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut dapat dilihat bahwa hanya variabel ukuran perusahaan yang berdistribusi normal dengan uji S-K yang melebihi 0,005, yaitu 0,5727. Hasil ini merujuk pada penelitian pendahulu yang menunjukkan bahwa data dalam penelitian tersebut tidak normal dengan nilai signifikansi lebih kecil dari pada α ($\alpha = 5\%$) yaitu 0,0039 dan melakukan hal yang sama yaitu menggunakan asumsi *Central Limit Theorem*. Kemudian penelitian ini melakukan pengujian multikolonieritas, dimana multikolonieritas merupakan pelanggaran asumsi disebabkan oleh terdapatnya hubungan yang kuat dari variabel independen pada suatu model regresi. Tujuan dari pemakaian uji multikolonieritas adalah untuk melihat apakah model regresi yang baik seharusnya terjadi diantara variabel independen[29]. Hasil uji multikolonieritas terdapat pada Tabel 4.

Berdasarkan tabel 4 dapat diperoleh bahwa terdapat korelasi antara Koneksi Politik dan Skandal yang terdapat dalam media ($0,5145 > 0,05$) dan terdapat hubungan antara ukuran perusahaan dan skandal yang terdapat dalam media ($0,3803 > 0,05$). Hasil menunjukkan bahwa ada korelasi antara entitas yang terkoneksi politik dengan peningkatan terjadinya skandal perusahaan tersebut. Indikasi seringnya terjadi penyelewengan hak manajemen perusahaan yang terkoneksi politik dalam hal ini BUMN

untuk menjalankan perusahaan secara bebas merupakan akibat dari banyaknya pimpinan BUMN ditunjuk berdasarkan kedekatan politik sehingga pimpinan tersebut tidak dapat tampil mandiri mengelola perusahaan[10]. Pengujian tersebut belum mempertimbangkan variabel lainnya, oleh karena itu peneliti masih akan melakukan analisis lanjut di analisis regresi.

Berdasarkan Tabel 3, hasil *Likelihood Ratio* menunjukkan hasil Likelihood Ratio (LR) yang merupakan yang berfungsi untuk menguji apakah semua *slope* koefisien regresi variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependennya. Pada tabel output diatas dapat dilihat bahwa pada pengujian dengan variabel *restatement* dengan hasil uji P Value sebesar 95%. P value Statistik adalah 0, 8565 sehingga H0 diterima, yang artinya adalah variabel secara serentak tidak memengaruhi terjadinya Manajemen Skandal. Pada pengujian dengan variabel skandal dengan tingkat keyakinan (probabilitas) sebesar 95%. Probabilitas LR Statistik adalah 0,0003 sehingga H0 ditolak, yang artinya adalah variabel secara serentak memengaruhi terjadinya Manajemen Skandal.

Tabel 3 juga menjelaskan bahwa hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada pengujian dengan variabel *restatement* menunjukkan nilai dari *pseudo R²* yaitu sebesar 0.0622 dengan probabilitas 0,8565. Hal tersebut berarti koneksi politik, *return on asset*, *book-to-market*, *firm size*, sektor, dan tahun dapat menjelaskan manajemen skandal sebesar 6,22%, sedangkan sisanya yaitu 93.78% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Pada uji *R square* pada pengujian dengan skandal menunjukkan nilai dari *pseudo R²* yaitu 0.2761 dengan probabilitas 0.0003. Hal tersebut berarti terdapat hubungan antara koneksi politik, *return on asset*, *book-to-market*, *firm size*, sektor, dan tahun dengan skandal manajemen sebesar 27,61% dan sisanya yang sebesar 72,39% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Tabel 5 mengenai hasil analisis regresi menunjukkan bahwa manajemen skandal dengan pengukuran skandal pada media (SKANDAL) memiliki konstanta sebesar 6,9095 dan bertanda *negative*. Hal tersebut mengungkapkan bahwa jika variabel lain yaitu koneksi politik serta variabel kontrol yaitu *return on asset*, *book-to-market*, ukuran perusahaan, industrial dan tahun bernilai konstan, maka manajemen skandal (SKANDAL) akan berkurang sebesar 6,9095.

Koneksi Politik (POLICON) memiliki berpengaruh positif terhadap SKANDAL. Hasil regresi ini menunjukkan bahwa koefisien regresi untuk variabel koneksi politik (POLICON) sebesar 2,3089 dan bertanda positif. Hal tersebut mengungkapkan adanya pengaruh positif terhadap skandal yaitu jika suatu perusahaan memiliki hubungan terhadap politik dimana dalam hal ini perusahaan tersebut merupakan milik negara maka akan meningkatkan probabilitas terjadinya skandal dalam menejemen perusahaan tersebut sebesar 2,3089.

Pada uji dengan variabel *restatement*, perusahaan yang berada pada tahun 2017 yang dijadikan sebagai variabel kontrol penelitian (Y1) memiliki korelasi dengan penyajian ulang laporan keuangan. Artinya adalah perusahaan-perusahaan sampel yang berada pada tahun 2017 akan menambah peluang terdapatnya skandal manajemen sebanyak 79.24%, *ceteris paribus*. Hal tersebut terjadi karena adanya faktor lain selain kecurangan yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan penyajian ulang laporan keuangan (PSAK No. 25).

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap manajemen skandal dengan proksi pemberitaan skandal akan tetapi tidak berpengaruh terhadap manajemen skandal dengan proksi penyajian ulang laporan keuangan. Hal tersebut memiliki arti bahwa koneksi secara politik yang ada dalam sebuah badan usaha dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan

kemungkinan terjadinya skandal manajemen pada perusahaan. Peningkatan tersebut terjadi karena badan usaha yang terkoneksi secara politik tersebut memiliki mutu manajemen yang lebih rendah[11].

Data *restatement* penelitian ini menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki skandal perusahaan tidak berarti bahwa perusahaan tersebut melakukan penyajian ulang pelaporan keuangan. Hal tersebut didukung oleh sebuah penelitian yang juga menjelaskan bahwa tidak adanya hubungan antara koneksi politik terhadap salah satu tindak curang terhadap pelaporan keuangan yang menyebabkan terjadinya penyajian ulang pelaporan keuangan yang menjadi skandal dalam manajemen perusahaan[13]. PSAK No. 25 mengungkapkan tidak hanya bentuk kecurangan yang menjadi penyebab terjadinya penyajian ulang laporan keuangan sehingga tidak bisa dikatakan bahwa koneksi secara politik tidak memberikan dampak secara langsung terhadap *restatement*. Hal lain yang menyebabkan perbedaan hasil pengujian dengan peneliti terdahulu diduga karena jumlah perusahaan yang terhubung politik yang sedikit yaitu sekitar 20 dari 50 perusahaan[3].

Hal tersebut bertentangan dengan hasil penelitian pendahulu yang mengatakan bahwa tindakan perusahaan dalam melakukan pelaporan kembali laporan keuangannya merupakan salah satu indikasi terdapatnya tujuan manipulasi angka dalam laporan dan menggambarkan manajemen perusahaan buruk sehingga berpengaruh terhadap penilaian laporan keuangan perusahaan oleh penanam modal[5][30]. Dampak buruk tersebut membuat perusahaan berhubungan secara politik terhadap suatu pihak maka perusahaan tersebut berusaha menjaga hak-hak istimewanya salah satunya adalah dengan menghindari terjadinya penyajian ulang laporan keuangan[31]. Hal tersebut juga didukung oleh PSAK No. 25 yang mengategorikan alasan terjadinya pelaporan keuangan yang disajikan kembali menjadi tiga kategori, antara lain berubahnya estimasi atau perkiraan akuntansi, kesalahan dasar,

serta perubahan dalam kebijakan akuntansi. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa koneksi secara politik dapat memberikan dampak secara langsung terhadap manajemen skandal dengan pengukuran menggunakan satu dari tiga alasan terjadinya penyajian ulang pelaporan keuangan tersebut yaitu kecurangan. Hal tersebut selaras dengan temuan penelitian sebelumnya yang mengungkapkan mengenai ketiadaan kaitan antara *political connection* dengan manajemen laba sebagai penyebab terjadinya penyajian pelaporan keuangan[13].

Sesuai dengan teori *stewardship* yang mendeskripsikan manajer perusahaan sebagai “*good steward*”, dimana seharusnya pihak manajer setia dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab dari para stakeholder selaku tuannya dan tidak bertindak atas materi ataupun uang melainkan karena kemauan untuk mengekspresikan diri dan mendapat utilitas dari pekerjaan yang dilakukannya, dan juga menjauhkan diri dari bentrokan kepentingan dengan pihak *stakeholder*. Pernyataan ini dibuktikan oleh penelitian sebelumnya yaitu mengatakan koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penerapan *good corporate governance* yang artinya perusahaan dengan koneksi politik belum tentu tidak menerapkan *good corporate governance* (GCG) yang baik[34].

Fenomena yang terjadi tidak sejalan dengan teori tersebut karena dengan pemilihan direksi BUMN berdasarkan koneksi politik tersebut juga menyebabkan pengawasan lembaga-lembaga pengawas akan melemah dan pengendalian tidak dapat berjalan optimal bila berkaitan dengan BUMN[6][13]. Keuntungan lain adalah keuntungan berupa perlakuan khusus seperti rendah risiko pemeriksaan pajak kemudahan mendapatkan perijinan utang[27]. Akan tetapi, keuntungan tersebut akan menyebabkan meningkatkan *financial distress* perusahaan karena adanya kemungkinan semakin banyaknya utang perusahaan[32].

Pada perusahaan swasta mekanisme pemilihan sumber daya dilakukan lebih selektif sehingga tidak adanya kelompok

koalisi politik yang pada akhirnya akan mempermudah perusahaan dalam mengendalikan pegawainya serta terhindar dari campur tangan pihak pemerintah dalam penetapan strategi perusahaannya sehingga perusahaan lebih fokus dalam mengembangkan perusahaannya[12]. Pada BUMN pemilihan direksi yang dimaksud adalah berdasarkan kedekatan politik karena pengangkatannya dilakukan berdasarkan keputusan Menteri BUMN melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 3 Tahun 2015 sehingga timbul banyak kepentingan-kepentingan tersembunyi dan saling berlawanan.

Banyaknya pimpinan BUMN yang ditunjuk berdasarkan kedekatan politik yang timbul dari kepentingan-kepentingan tersembunyi yang ada tersebut juga dapat menyebabkan pimpinan tersebut tidak dapat tampil mandiri mengelola perusahaan dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam hubungan tersebut [15][22]. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini adalah Erick Thohir (2020) yang mengatakan bahwa masih adanya direksi BUMN yang tidak kompeten salah satunya adalah tidak mengerti mengenai laporan keuangan yang menyebabkan beliau melakukan pergantian sumber daya dan melakukan berbagai pelatihan (www.liputan6.com). Hal ini dilihat dari seringnya terjadi pergantian direksi BUMN yang dilakukan oleh Menteri BUMN pada 2019 hingga 2020 dan masih terus berjalan, karena *key performance indicator* (KPI) tidak tercapai dan pengurus perusahaan itu menyalahi tata kelola perusahaan yang baik (www.economy.okezone.com).

Contoh skandal yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah tindak korupsi oleh Dirut Garuda Indonesia pada 2018 yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menerima suap senilai dua miliar dollar Amerika dari perusahaan asal Inggris agar menjadi penyedia mesin bagi Garuda. Kemudian juga terjadi juga pada BUMN PT. Kertas Leces yang memiliki skandal pada tahun 2018. PT Kertas Leces tersebut dinyatakan pailit sejak 25 September 2018. Perusahaan dikatakan menunggak gaji karyawan sebanyak 1900 orang yang bernilai lebih dari tiga ratus miliar rupiah dan secara keseluruhan tagihan perusahaan yang mencakup hutang pajak, tunggakan gaji, dan lainnya adalah sekitar Rp.2,1 Triliun. Contoh lain di luar negeri adalah skandal yang terjadi pada perusahaan milik negara di Australia[33]. Kasus tersebut terjadi pada perusahaan *National Australia Bank* yang terjadi akibat penyembunyian kerugian dalam hal pertukaran valuta asing dari kegiatan jual-beli yang salah dan penyelewengan terhadap sistem yang tidak dapat dibaca oleh pemeriksa/auditor dari luar perusahaan dan berdampak terhadap pelaporan keuangan yang tidak tepat.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa dengan pemberitaan skandal yang terdapat dalam media pada perusahaan terkoneksi politik yaitu BUMN dan BUMD, memiliki probabilitas lebih tinggi untuk mengalami manajemen skandal daripada perusahaan swasta yang tidak terkoneksi politik. Hal tersebut terjadi karena pemilihan sumber daya yang berbeda antara BUMN dan swasta. Pada pengukuran *restatement*, tidak ditemukan pengaruh antara koneksi politik dengan probabilitas terjadinya manajemen skandal.

Tabel 1. Keterangan Model Regresi

Variabel	Penjelasan
REST	Variabel <i>dummy</i> untuk skandal manajemen dengan pengukuran <i>Restatement</i> , dimana: perusahaan i melakukan <i>restatement</i> pada tahun $t = 1$, 0 jika lainnya.
SKANDAL _{it}	Variabel <i>dummy</i> untuk skandal manajemen dengan pengukuran skandal perusahaan pada media, dimana: perusahaan i memiliki skandal pada media pada tahun $t = 1$, 0 jika lainnya. <i>Variabel dummy</i> untuk <i>Politic Connection</i> , dimana perusahaan i terkoneksi politik pada tahun $t = 1$, 0 jika lainnya
YearControl _{it}	Logaritma natural aset perusahaan i secara keseluruhan pada tahun berjalan t
A	harga pasar saham dibagi nilai buku perusahaan i pada tahun berjalan t
ε	Perbandingan antara <i>net income</i> dengan seluruh jumlah aset perusahaan i pada akhir periode t Pertanian, Pertambangan, Industri Dasar dan Kimia, Aneka Industri, Industri Barang Konsumsi, Properti - <i>real estate</i> - dan konstruksi bangunan, Infrastruktur, utilitas, dan transportasi, Finansial, Perdagangan - jasa dan Investasi
	2017, 2018
	Konstanta
	Standart error (kesalahan)

Tabel 2. Sampel Berdasarkan Kriteria

Kriteria	Jumlah		Total
	2017	2018	
Panel A: Sampel Berdasarkan Skandal			
Perusahaan BUMN yang diidentifikasi memiliki skandal	17	16	33
Perusahaan swasta yang diidentifikasi memiliki skandal	10	8	18
Perusahaan BUMN yang diidentifikasi tidak memiliki skandal	3	4	7
Perusahaan swasta yang diidentifikasi tidak memiliki skandal	20	22	42
Jumlah sampel	50	50	100
Panel B: Sampel Berdasarkan <i>Restatement</i>			
Perusahaan BUMN yang melakukan <i>restatement</i> laporan keuangan	5	7	12
Perusahaan swasta yang melakukan <i>restatement</i> laporan keuangan	15	5	20
Perusahaan BUMN yang tidak melakukan <i>restatement</i> laporan keuangan	15	13	18
Perusahaan swasta yang tidak melakukan <i>restatement</i> laporan keuangan	15	25	40
Jumlah sampel	50	50	100

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Obs.	Max	Min	Mean	Std. Deviation
Panel A – Data Nominal					
ROA	100	0,2585	-20,0304	-0,3858	2,7448
BTM	100	181,0088	-6,3786	4,4043	23,4877
FMSIZE	100	34,7988	24,7440	30,1890	1,9912
Panel B – Data Dummy					
	Proporsi Dummy = 0			Proporsi Dummy = 1	
	Obs.	%	Obs.	%	
SKANDAL	49	49	51	51	
REST	68	68	32	32	
POLICON	60	60	40	40	
S1	92	92	8	8	
S2	84	84	16	16	
S3	90	90	10	10	
S4	92	92	8	8	
S5	90	90	10	10	
S6	86	86	14	14	
S7	88	88	12	12	
S8	88	88	14	14	
Y1	50	50	50	50	

Catatan untuk tabel 2:

ROA = total net income dibagi dengan total aset; BTM = rasio sebagai parameter menghitung ukuran kinerja suatu institusi melalui harga pasarnya; FMSIZE = logaritma ukuran perusahaan; SKANDAL = variable dummy bernilai 1 jika memiliki skandal dimedia pada tahun sekarang, bernilai 0 jika sebaliknya; REST = variable dummy bernilai 1 jika melakukan penyajian ulang laporan keuangan, bernilai 0 jika sebaliknya; POLICON = variable dummy bernilai 1 jika merupakan BUMN, bernilai 0 jika sebaliknya; S1 = Sektor Pertanian; S2 = Sektor Pertambangan; S3 = Sektor Industri Dasar Dan Kimia; S4 = Sektor Aneka Industri; S5 = Sektor Industri Barang Konsumsi; S6 = Sektor Properti; S7= Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi; S8 = Sektor Keuangan; Y1 = Tahun Kontrol 2017

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Pairwise Colleration						VIF	Tolerance Level (1/VIF)
	REST	SKANDAL	POLICON	ROA	BTM	FMSIZE		
REST	1,0000							
SKANDAL	-0,0137	1,0000						
POLICON	-0,0350	0,5145 *	1,0000				1,31	0,59696
ROA	0,0856	-0,0032	-0,1634	1,0000			1,31	0,76406
BTM	0,0432	-0,1468	-0,1308	0,0309	1,0000		3,00	0,33361
FMSIZE	0,0742	0,3803 *	0,4940 *	0,3970 *	-0,0169	1,0000	2,19	0,45565

Mean VIF = 2.18

Catatan :

Deskripsi variabel sama seperti sebelumnya

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi

n = 100	Restatement			Skandal		
	Coeff.	(Std. Error)	z	Coeff.	(Std. Error)	Z
Cons.		(-3,3382)	-0,59		(-6,9095)	-1,09
POLICON	-0,2305	(0,6241)	-0,37	2,3089***	(0,7244)	3,19
ROA	0,0950	(0,2022)	0,47	-0,0141	-0,0141	-0,13
BTM	-0,0013	(0,0100)	-0,13	-0,0252	(0,0343)	-0,73
FMSIZE	0,0838	(0,1940)	0,43	0,1961	(0,2168)	0,90
S1	0,4895	(1,1316)	0,43	0,8662	(1,1790)	0,73
S2	-0,4258	(1,0015)	-0,43	-0,5602	(1,1325)	-0,49
S3	0,0822	(1,0199)	0,08	-0,5882	(1,1656)	-0,50
S4	-1,4172	(1,3192)	-1,07	0,1433	(1,1740)	0,12
S5	-0,2640	(1,0440)	-0,25	0,1078	(1,1190)	0,10
S6	-0,1479	(1,0078)	-0,15	1,1088	(1,1526)	0,96
S7	-0,2861	(1,0448)	-0,27	0,4614	(1,1501)	0,40
S8	-0,5632	(1,0908)	-0,52	-0,4536	(1,2280)	-0,37
Y1	0,7924*	(0,4506)	1,76	0,3721	(0,4944)	0,75
Prob > chi2		0,8565			0,0003	
Pseudo R ²		0,0622			0,2761	

Catatan :

Deskripsi variabel sama seperti sebelumnya.

***signifikan pada 1%; **signifikan pada 5%;

*signifikan pada 10%

Perbedaan hasil tersebut dikarenakan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi secara politik tidak selamanya melakukan *restatement* akan tetapi menghadapi risiko terjadinya manajemen skandal yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan swasta. Penyebab lainnya adalah penyajian ulang tersebut merupakan hal yang dilakukan secara sengaja oleh entitas baik karena

perubahan peraturan ataupun hal lain, sedangkan pemberitaan skandal bisa saja terjadi tanpa direncanakan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perusahaan yang mengalami skandal belum tentu akan melakukan penyajian laporan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa *political connection* berpengaruh terhadap manajemen skandal yang menyebabkan terjadinya pemberitaan skandal perusahaan pada media [8][11][34][6].

4. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh terhadap manajemen skandal yang terindikasikan oleh pemberitaan skandal perusahaan yang terdapat pada media massa. BUMN yang merupakan perusahaan yang terkoneksi secara politik memiliki probabilitas lebih besar untuk melakukan manajemen skandal dibandingkan perusahaan swasta. Koneksi politik dengan proksi *restatement* tidak berpengaruh terhadap manajemen skandal. Saat perusahaan yang memiliki koneksi politik melakukan penyajian ulang terhadap pelaporan keuangannya, hal ini tidak memengaruhi probabilitas terjadinya manajemen skandal.

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris atas manajemen skandal khususnya untuk perusahaan milik negara yang memiliki *political connection* lebih besar dibandingkan perusahaan swasta. Kajian perbandingan tentang manajemen skandal pada dua jenis perusahaan tersebut jarang diangkat menjadi isu penelitian.

Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan persentase kepemilikan perusahaan. Kajian tentang regulasi terkait sanksi kecurangan dapat juga disoal untuk memperkaya penelitian tentang manajemen skandal.

Daftar Rujukan

- [1] Albrecht WS, Albrecht CO, Albrecht CC, Zimbelman MF. Fraud Examination. South-Western Cengage Learn. 2012;13(7). doi: doi.org/10.21009/JRMSI.007.1.09
- [2] Association of Certified Fraud Examiners. Report to the nations 2018:8.
- [3] Nugrahanti YW, Puspitasari A. Pengaruh Hubungan Politik , Ukuran Kantor Akuntan Publik , dan Audit Tenure Terhadap Manajemen Laba Riil. J Akunt dan Keuang. 2016;18(1):27–43. doi: doi.org/10.9744/jak.18.1.27-43
- [4] Lestari PAS, Pratomo D, Asalam AG. Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. J ASET (Akuntansi Riset). 2019;11(1):40–5. doi: doi.org/10.17509/jaset.v11i1.15772
- [5] Nuryani N. Pengaruh Restatement Laporan Keuangan dan Manajemen Laba Terhadap Kualitas Laba Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Pemoderasi. J Akunt. 2012;01:25–37.
- [6] Wang Z, M. C, Chin CL, Zheng Q. Managerial Ability, Political Connections, and Fraudulent Financial Reporting in China. J Account Public Policy. 2017;36:141–62. doi: doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2017.02.004
- [7] Julekhah F, Rahmawati E. Pengaruh Media Exposure, Sensitivitas Industri, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Publik dan Profitabilitas Terhadap Environmental Disclosure dan Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan. Reviu Akunt dan Bisnis Indones. 2019;3(1):50–66. doi: doi.org/10.18196/rab.030136
- [8] Putri VR. Keterkaitan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi. J Ekon Manaj Perbank. 2018;4(1):20–8. doi: dx.doi.org/10.35384/jemp.v4i1.119
- [9] Matangkin L, Ng S, Mardiana A. Pengaruh Kemampuan Manajerial dan Koneksi Politik Terhadap Reaksi Investor dengan Kecurangan Laporan Keuangan sebagai Variabel Media. SiMAk. 2018;16(2):182–209. doi: [doi.org/https://doi.org/10.35129/simak.v16i02.42](https://doi.org/10.35129/simak.v16i02.42)
- [10] Andrés LA, Guasch JL, López Azumendi S. Governance in State-owned Enterprises Revisited. The Cases of Water and Electricity in Latin America and the Caribbean. Policy Reseach Work Pap World Bank. 2011;5747. doi: [doi://doi.org/10.1596/1813-9450-5747](https://doi.org/10.1596/1813-9450-5747)
- [11] Faccio M, Masulis RW, Mcconnell JJ.

- Political Connections and Corporate Bailouts. *J Finance*. 2006;61(6). doi:doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.01000.x
- [12] Fadhy Z. Perbandingan Manajemen Sektor Pemerintahan dengan Sektor Swasta. *J Public Policy*. 2019;2(2):186–95. doi: doi.org/10.35308/jpp.v2i2.1014
- [13] Putra MA, Andreas, Nasrizal. Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Gender Diversity, Koneksi Politik, Debt to Equity Terhadap Penghindaran Pajak dan Manajemen Laba sebagai Variabel Intervening. *IEEE Commun Surv Tutor*. 2018;26(4). doi:dx.doi.org/10.31258/je.26.4.p.52-71
- [14] Saebani A, Putra AM, Aulia D. Does IFRS Impact on Indonesian Financial Reporting Quality and Performance? A case Study of Companies in Indonesia. *Int J Innov Creat Chang*. 2019;7(5):147–161.
- [15] Azre IA. Analisis Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus PT Grafika Jaya Sumbar). *J Adm dan Kebijakan Publik*. 2019;2(3):187–203. doi: [10.25077/jakp.2.3.187-203.2017](https://doi.org/10.25077/jakp.2.3.187-203.2017)
- [16] BUMN M. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara. PER-03/MBU/02/2015 2015. Peraturan Menteri 2015;17 Feb.
- [17] Donaldson L, Davis JH. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Aust J Manag*. 1991. doi:doi.org/10.1177/031289629101600103
- [18] Kristanto AT. Pengaruh Political Connections Terhadap Kinerja Perusahaan. *EXERO J Res Bus Econ*. 2019;02(01). doi:doi.org/doi.org/10.24071/exero.2019.02.01.01
- [19] Agrawal A, Knoeber CR. Do Some Outside Directors Play a Political Role? *J Law Econ*. 2001;44(1):179–98. doi: doi.org/10.1086/320271
- [20] Wareza M. Tiga Pilar dan Drama Penggelembungan Dana. *CNBC Indonesia*. *CNN Indonesia* 2019;29 Mar.
- [21] Triwijanarko R. Bisakah Koneksi Politik Meningkatkan Nilai Perusahaan. *Marketeers*. *Marketeers* 2018; 9 Nov.
- [22] Ferdiawan Y, Firmansyah A. Pengaruh Political Connection, Foreign Activity, dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance. *J Ris Akunt dan Keuang*. 2017;5(3):1601–24. doi: doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9223
- [23] Kamarudin KA, Ismail WAW, Mustapha WAHW. Aggressive Financial Reporting and Corporate Fraud. *Procedia - Soc Behav Sci*. 2012;65:638–43. doi: [10.1016/j.sbspro.2012.11.177](https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.177)
- [24] Rezaee Z. Causes, Consequences, and Deterrence of Financial Statement Fraud. *Crit Perspect Account*. 2005;16(3):277–89. doi: [10.1016/S1045-2354\(03\)00072-8](https://doi.org/10.1016/S1045-2354(03)00072-8)
- [25] Purwanti MS, Sugiyarti L. Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi. *J Ris Akunt Dan Keuang*. 2017;5(3):1625–41. doi: doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9225
- [26] Primasari R, Sudarno. Pengaruh Koneksi Politik dan Corporate Governance Terhadap Audit Fee. *Diponegoro J Account*. 2013;2(2).
- [27] Fadila M, Rasuli M, Rusli. Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *J Online Mhs Fak Ekon Univ Riau*. 2017;4(1):1671–84. doi:doi.org/10.16242/j.cnki.umst.2014.04.005

- [28] Musdholifah, Puspitasari D. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Perataan Laba Pada Sektor Industri Perbankan. *Bisnis dan Manajemen*. 2009; 2(1):48-60. doi:[dx.doi.org/10.26740/bisma.v2n1.p48-60](https://doi.org/10.26740/bisma.v2n1.p48-60)
- [29] Ghozali I. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Proqram IBM SPSS 25. (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2018. p. 97–130.
- [30] Siregar NY, Rahayu F. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Restatement dan Dampaknya Terhadap Harga Saham. *J Ilm Esai*. 2018;12(2). doi: doi.org/10.25181/esai.v12i2.1126
- [31] Braam G, Nandy M, Weitzel U, Lodh S. Accrual-based and real earnings management and political connections. *Int J Account*. 2015;50(2):111–41. doi:dx.doi.org/10.1016/j.intacc.2013.10.w009
- [32] Permana KM, Ahmar N, Djadang S. Prediksi Financial Distress Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*. 2017;7(2):149-166. doi: [10.15408/ess.v7i2.4797](https://doi.org/10.15408/ess.v7i2.4797)
- [33] Iqbal M, Murtanto. Analisa Pengaruh Faktor-faktor Fraud Triangle terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Semin Nas Cendekiawan*. 2016. doi:dx.doi.org/10.25105/semnas.v0i0.900
- [34] Chaney PK, Faccio M, Parsley D. The Quality of Accounting Information in Politically Connected Firms. *J Account Econ*. 2011;51:58–76. doi:doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.07.003